**SKRIPSI**

# EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA ANSOLOK KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**

**Oleh :**

**Kristiani**
**NIM.E1032211067**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**PONTIANAK**
**2025**

# EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA ANSOLOK KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**

Oleh:
Kristiani
NIM.E1032211067

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**PONTIANAK**
**2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA ANSOLOK KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK**

**Tanggung Jawab Yuridis Pada :**

**KRISTIANI**
**E1032211067**

**Disetujui oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dr. Saherimiko, M. Si** **Tanggal : 11/03/2025**

**NIP. 196605041995121001**

**Dosen Pembimbing Pendamping**

**Bima Sujendra, S.IP, M.Si** **Tanggal : 08/07/2025**

**NIP. 198805072014041002**

Dipindai dengan CamScanner

## LEMBAR PENGESAHAN

# EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA ANSOLOK KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK

Oleh:

Kristiani
NIM.E1032211067

| | |
|---|---|
| Dipertahankan di | : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| Pada Hari/anggal | : Senin/15 September 2025 |
| Waktu | : 10:00 WIB |
| Tempat | : Ruang Sidang 4 |

**Tim Penguji**

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| Dr. Saherimiko, M.Si | Bima Sujendra S.IP, M.Si |
| NIP. 196605041995121001 | NIP. 198805072014041002 |
| **Penguji Utama** | **Penguji Pendamping** |
| Martinus, S.Sos, M.Si | Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si. |
| NIP. 197212272006041002 | NIP. 198306272006042020 |

**Disahkan Oleh :**
**Dekan Fisip Untan**

**Dr. Herlan, S.Sos, M.Si**
**NIP 197205212006041001**



Dipindai dengan CamScanner

## ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada efektivitas penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di Desa Ansolok, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana administrasi kependudukan dilaksanakan secara efektif. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diperoleh dengan triangulasi sumber dan teknik. Masalah utama yang ditemukan mencakup minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta respons pemerintah desa yang masih rendah. Analisis menggunakan teori Duncan dengan tiga indikator: pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi. Pada pencapaian tujuan, keterlaksanaan administrasi kependudukan masih belum optimal terutama dalam pembuatan dokumen. Pelayanan administrasi sudah tersedia, namun kurang diikuti masyarakat karena kelalaian dalam menanggapi arahan. Tertib administrasi berjalan cukup baik, meski masih terkendala keterlambatan pelaporan, ketergantungan pada sistem manual, dan belum adanya digitalisasi. Pada aspek adaptasi, inovasi pelayanan administrasi masih tradisional tanpa pembaruan signifikan. Respons terhadap keluhan masyarakat belum maksimal akibat keterbatasan tenaga, fasilitas, dan alur birokrasi yang panjang. Pada aspek integrasi, komunikasi antara petugas dan masyarakat sudah dilakukan melalui pengumuman dan edukasi. Koordinasi antarpetugas serta unit terkait berjalan sesuai peran masing-masing. Namun, sarana dan prasarana yang tersedia masih belum memadai untuk menunjang kelancaran pelayanan administrasi kependudukan. Secara keseluruhan, penyelenggaraan administrasi kependudukan di Desa Ansolok telah berjalan, tetapi efektivitasnya masih terbatas karena faktor pengetahuan masyarakat, minim inovasi, serta keterbatasan fasilitas dan digitalisasi.



Kata Kunci: Efektivitas, Administrasi Kependudukan, Pencapaian Tujuan, Adaptasi, Integrasi.

## ABSTRACT

This research focuses on the effectiveness of the application of orderly population administration in Ansolok Village, Mempawah Hulu Sub-District, Landak Regency. The aim is to describe and examine the effectiveness of population administration. This research employed a qualitative descriptive approach, and the data were collected through interviews, observation, and documentation. Triangulation of sources and techniques was used to ensure data validity. The key problems that have been identified are the lack of knowledge among the people on the significance of population administration, lack of facilities and infrastructure, and low response rate of the village government. The analysis was conducted based on the theory of Duncan, which involves three indicators: goal achievement, adaptation, and integration. Goal achievement: Population administration has not been optimally implemented particularly in issuing official documents. Services are present but not used fully due to the tendency of residents to disregard instructions. Administrative order is relatively efficient but is affected by delays in reporting, use of manual systems, and lack of digitalization. In the aspact of adaptation: there are no major updates to administrative service innovations. Community complaints are not addressed because of shortage of staff, facilities and long bureaucratic processes. In the aspaect of integration: the communication between the officers and the community occurs through announcements and education. The coordination between officers and other related units operates based on their roles. Nevertheless, the facilities and infrastructure available are still inadequate to facilitate smooth administrative services. In general, the population administration in Ansolok Village is functioning but its effectiveness is low because of the lack of awareness among residents, low levels of innovation, and poor facilities and digital systems.



***Keywords****: Effectiveness, Population Administration, Goal Achievement, Adaptation, Integration.*

## RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "*Efektivitas Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kependudukan Desa Ansolok Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak"* dipilih penelitian karena adanya masalah dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di desa tersebut. Tujuan peneliti memilih penelitian tersebut untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait efektivitas penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di Desa Ansolok Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian tersebut yaitu masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap administrasi kependudukan, pelayanan administrasi kependudukan kurang responsif terhadap keluhan masyarakat , serta sarana dan prasarana yang tidak memadai, . Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas penyelenggaraan tertib administrasi di Desa Ansolok.

Menganalisis masalah yang ada, peneliti menggunakan teori dari Duncan (dalam Steers 2008, 53) yang mengemukakan ukuran efektivitas terdiri dari pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi. Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan usaha organisasi untuk memperoleh tujuannya dan wajib untuk dilihat sebagai sebuah proses. Adaptasi adalah suatu keahlian yang dimiliki organisasi untuk menempatkan dirinya kepada lingkungan sekitar. Integrasi adalah mengukur tingkat keahlian dalam suatu organisasi untuk melakukan komunikasi ataupun sosialisasi dengan beraneka ragam organisasi lain yang ada, serta merupakan pengembangan konsensus.

Dari aspek pencapaian tujuan terdapat tiga indikator yaitu keterlaksanaan, pelayanan, dan ketertiban administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi masih belum optimal, khususnya dalam hal penyediaan dokumen kependudukan. Pelayanan berjalan dengan baik, namun masyarakat juga sering lalai memenuhi arahan desa sehingga memperlambat proses. Meski begitu, sistem pencatatan dan pengarsipan sudah berjalan cukup baik, meski masih manual dan menghadapi kendala keterlambatan laporan serta rendahnya partisipasi warga.

Dari aspek adaptasi indikator yang diteliti adalah inovasi pelayanan dan responsivitas terhadap keluhan masyarakat. Pelayanan masih bersifat tradisional dan minim inovasi, meskipun ada langkah kecil seperti penyederhanaan alur layanan dan sistem antrian. Kendala utama adalah keterbatasan fasilitas, rendahnya literasi teknologi, serta minimnya pelatihan bagi aparat. Keluhan masyarakat umumnya didengar dan dicatat, tetapi tindak lanjut belum maksimal karena tenaga dan sarana terbatas. Aparat desa sebenarnya terbuka terhadap kritik, namun sebagian warga merasa keluhan mereka kurang ditanggapi sehingga enggan menyampaikan kembali.

Aspek integrasi dilihat dari komunikasi, koordinasi, serta sarana prasarana. Komunikasi antara aparat dan masyarakat dilakukan lewat pengumuman di balai desa maupun penjelasan langsung. Namun, sering terjadi kendala karena warga tidak melengkapi dokumen, atau petugas kurang sabar dalam menjelaskan. Koordinasi antarpetugas di internal desa sudah cukup sistematis, tetapi masih fleksibel dan situasional, serta belum terjadwal.

Sinkronisasi dengan instansi di kecamatan atau kabupaten juga belum optimal sehingga menimbulkan keterlambatan. Dari segi sarana prasarana, pelayanan terkendala keterbatasan perangkat, ruang sempit, serta koneksi internet yang tidak stabil, sehingga proses administrasi berjalan lambat dan kurang nyaman.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di Desa Ansolok sudah berjalan, namun efektivitasnya masih belum maksimal. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, pemerintah desa perlu melakukan pendataan ulang secara menyeluruh dan menyusun target capaian yang terukur, seperti peningkatan kepemilikan KTP elektronik dan akta kelahiran. Kedua, dalam aspek adaptasi, pemerintah desa harus meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkala serta memanfaatkan teknologi digital. Ketiga, dari aspek integrasi, diperlukan kerja sama yang lebih erat dengan Disdukcapil Kabupaten agar pelayanan kependudukan lebih cepat dan optimal. Dengan perbaikan pada tiga aspek tersebut, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan di Desa Ansolok dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Kristiani

Nomor Mahasiswa : E1032211067

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 15 September 2025

Yang Membuat Pernyataan




(Kristiani)

NIM.E1032211067



Dipindai dengan CamScanner

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

***In the Name Of Jesus Christ***

"Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan. *Prove Them Wrong"*

"Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku"

(Mazmur 118:13)

"Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia"

(Kolose 3:23)

"Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal"

(Ayub 42:2)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu melindungi dan memberikan nafas kehidupan, serta selalu senantiasa menyertai setiap langkah hidup saya.
2. Orang tua tersayang bapak saya Donatus dan ibu saya Rusmawati, abang saya Julius Rajaki Marantika serta adik saya Melky Zedek dan Gevariel Junior yang selama ini telah mendukung dengan tulus dan memberikan doa selama proses pendidikan di perguruan tinggi.
3. Terkhususnya untuk diri sendiri '*Kristiani*' yang sudah kuat bertahan menjalani proses perkuliahan dari awal hingga akhir dengan sangat sabar dan tidak pernah menyerah untuk bangkit dari kegagalan.

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kependudukan di Desa Ansolok Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak".

Skripsi yang disusun oleh penulis merupakan tugas akhir dan suatu keharusan yang mesti diselesaikan sebagai tuntutan untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari jika penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Herlan, Sos, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Saherimiko, M.Si. selaku Pembimbing Utama, dan Bima Sujendra, S.IP, M.Si. selaku Pembimbing Pendamping sekaligus selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
3. Martinus, S.Sos, M.Si. selaku Dosen Penguji pertama dan Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si. selaku Dosen Penguji kedua yang telah banyak

memberikan masukan guna kesempurnaan dalam penelitian ini.

4. Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi
5. Dr. Isdairi, M.AB selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) semasa penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
6. Kepala Desa dan para staf di kantor Desa Ansolok serta masyarakat Desa Ansolok yang sudah bersedia memberikan data untuk mendukung dan memotivasi kepada penulis selama penulisan skripsi.
7. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi.
8. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2021 yang sudah memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi.

Semoga semua dorongan serta bantuan yang sudah diberikan pada penulis menerima balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan hasil karya yang penulis lakukan ini bisa memberikan manfaat yang bermakna untuk kita semua yang membutuhkannya.

Pontianak, 15 September 2025

Penulis

Kristiani

NIM.E1032211067

## DAFTAR ISI

*halaman*

HALAMAN PENGESAHAN ..... i

ABSTRAK ..... ii

ABSTRACT ..... ii

RINGKASAN SKRIPSI ..... iii

PERNYATAAN KEASLIAN ..... ix

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... x

KATA PENGANTAR ..... xi

DAFTAR ISI ..... xiii

DAFTAR TABEL ..... xv

DAFTAR GAMBAR ..... xvi

DAFTAR LAMPIRAN ..... xvii

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

1.1. Latar Belakang Penelitian ..... 1
1.2. Identifikasi Masalah ..... 10
1.3. Fokus Penelitian ..... 10
1.4. Rumusan Masalah ..... 10
1.5. Tujuan Penelitian ..... 11
1.6. Manfaat Penelitian ..... 11
1.6.1. Manfaat Teoritis ..... 11
1.6.2. Manfaat Praktis ..... 11

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 12**

2.1. Teori ..... 12
2.1.1. Efektivitas ..... 12
2.1.2. Tertib Administrasi ..... 17
2.1.3. Administrasi Kependudukan ..... 18
2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan ..... 20

2.3. Alur Pikir Penelitian ..... 25
2.4. Pertanyaan Penelitian ..... 28

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 29**

3.1. Jenis Penelitian ..... 29
3.2. Langkah-langkah Penelitian ..... 29
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 30
3.3.1. Lokasi Penelitian ..... 30
3.3.2. Waktu Penelitian ..... 31
3.4. Subjek dan Objek Penelitian ..... 32
3.4.1. Subjek Penelitian ..... 32
3.4.2. Objek Penelitian ..... 33
3.5. Teknik Pengumpulan Data ..... 34
3.6. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data ..... 35
3.7. Teknik Analisis Data ..... 36
3.8. Teknik Keabsahan Data ..... 37

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ..... 39**

4.1. Gambaran Umum Desa Ansolok ..... 39
4.1.1 Sejarah Wilayah ..... 39
4.1.2. Keadaan Geografis ..... 41
4.1.3. Keadaan Demografi ..... 42
4.2. Organisasi Pemerintah Desa Ansolok ..... 43
4.3. Visi dan Misi Desa Ansolok ..... 46
4.4. Sarana dan Prasarana Desa Ansolok ..... 48

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 49**

5.1. Pencapaian Tujuan ..... 50
5.2. Adaptasi ..... 62
5.3. Integrasi ..... 71

**BAB VI PENUTUP ..... 87**

6.1. Kesimpulan ..... 87
6.2. Saran ..... 92
6.3. Keterbatasan Penelitian ..... 93

**DAFTAR PUSTAKA ..... 94**

# DAFTAR TABEL

*halaman*


1.1. SOP Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Ansolok ..... 4

2.1. Hasil Penelitian Yang Relevan ..... 20

3.1. Waktu Penelitian ..... 31

4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... 42

4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama ..... 43

4.3. Tingkat Pendidikan Aparatur Desa ..... 46

5.1. Rekapitulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Pemerintahan Desa Ansolok ..... 52

# DAFTAR GAMBAR

*halaman*

1.1. Data Yang Belum Rekaman E-KTP ..... 7

2.1. Alur Pikir Penelitian ..... 27

4.1. Struktur Pemerintahan Desa Ansolok ..... 45

## DAFTAR LAMPIRAN

*halaman*

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian ..... 96

Lampiran 2. Pedoman Observasi ..... 99

Lampiran 3. Hasil Dokumentasi ..... 100

Lampiran 4. Surat Tugas Penelitian ..... 103

Lampiran 5. Biodata Peneliti ..... 104

# BAB 1
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa berada di bawah pemerintah kabupaten langsung dalam struktur pemerintahan nasional. Dalam Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 7 Ayat (1) huruf f bahwa penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan. Dalam hal ini berarti bahwa pemerintah desa diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan beberapa tugas administrasi kependudukan yang sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah pusat atau daerah.

Pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa tertuang bahwa kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk. Lebih lanjut dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 ayat (4) huruf i bahwa kepala desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik. Hal tersebut menggambarkan bahwa kepala desa harus memastikan seluruh proses administrasi dikelola dengan profesional termasuk dalam hal pelayanan administrasi kependudukan di desa.

Pengelolaan dan pengaturan surat-surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan operasi pemerintahan desa dikenal sebagai administrasi desa. Kepala desa dan aparatur desa yang juga menjalankan tugas administrasi sangat penting karena mereka adalah organ pemerintahan yang paling bawah dan tahu semua masalah dan kondisi di wilayah mereka. *Input* dari pemerintah kecamatan tentang berbagai informasi sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan di daerah dan nasional. Untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan benar-benar tercapai adalah penting untuk memastikan administrasi pemerintah desa berjalan dengan baik dalam semua kegiatan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan pekerjaan yang diberikan kepada pemerintah.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran

(*output*). Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan suatu rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah ditentukan. Jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang ditetapkan, maka hal ini tidak dikatakan efektif. Oleh karena itu, kepala desa dan perangkat desa harus memiliki kapasitas yang memadai atau optimal untuk mencapai tujuan menertibkan administrasi desa. Kualitas ini tidak hanya harus didasarkan pada kapasitas dan keterampilan yang memadai, tetapi juga harus disertai dengan disiplin yang tinggi dan rasa tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa administrasi desa diurus dengan tertib.

Administrasi kependudukan merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di tingkat desa. Administrasi kependudukan yang tertib dan efektif menjadi kunci dalam mendukung berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta perlindungan hak-hak sipil masyarakat. Di Indonesia, upaya penataan administrasi kependudukan telah diatur melalui berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk di Kabupaten Landak melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Landak "Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah serta untuk meningkatkan pelayanan, penataan dan penertiban kepada masyarakat Kabupaten

Landak di bidang administrasi kependudukan, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Landak dan orang asing yang berada dalam wilayah Kabupaten Landak. Setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku".

**Tabel 1.1**

**SOP Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Ansolok**

| **Dasar Hukum** | **Kualifikasi Pelaksanaan** | **Fasilitas Peralatan/Perlengkapan** |
|---|---|---|
| 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<br>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. | Kasi Pemerintahan Desa | 1. Komputer<br>2. Alat komunikasi<br>3. Buku kerja, Buku Agenda, dan lainnya.<br>4. Ruang Tunggu |
| **Persyaratan** | **Alur Pembuatan** | **Pencatatan dan Pendataan** |

| Dokumen Kependudukan | | |
|---|---|---|
| 1. Persyaratan pembuatan KK adalah KTP, surat menikah, KK kedua belah pihak.<br>2. Persyaratan menambah KK adalah KTP, Akta kelahiran.<br>3. Persyaratan pembuatan KTP adalag KK, Akta kelahiran, Ijazah.<br>4. Persyaratan pembuatan KIA adalah KK dan Akta kelahiran.<br>5. Pembuatan Akta Kelahiran dilaporkan langsung ke Disdukcapil.<br>6. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan dikabulkan. | 1. Dapat menyertakan surat pengantar dari ketua RT/RW (opsional) jika memerlukan surat domisili.<br>2. Datang langsung ke kantor Desa.<br>3. Setelah data atau persyaratan terkumpul, 1-3 hari langsung diserahkan ke kecamatan oleh kasi pemerintahan Desa. | 1. Bermanfaat untuk validasi pencatatan sipil dan data kependudukan.<br>2. Mendukung tercapainya tertib administrasi penduduk. |

***Sumber : Kantor Desa Ansolok, 2025***

Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di pemerintahan desa seringkali menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan yang umum dijumpai antara lain minimnya pengetahuan masyarakat terhadap administrasi kependudukan, sarana

dan prasarana yang belum memadai, serta Pemerintah Desa Ansolok kurang responsif terhadap administrasi kependudukan. Hal ini menyebabkan data kependudukan seringkali tidak akurat dan pelayanan administrasi menjadi kurang efektif, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen lainnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa terkait prosedur, manfaat, dan konsekuensi jika tidak memiliki dokumen kependudukan, tingkat pendidikan masyarakat yang beragam sehingga pemahaman tentang birokrasi tidak merata, adanya anggapan bahwa dokumen kependudukan tidak terlalu penting, padahal dokumen tersebut sangat dibutuhkan dalam mengakses layanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.

Persoalan administrasi kependudukan masih menjadi keluhan yang cukup sering muncul di tengah masyarakat. Selain masyarakat desa, pemerintah desa juga membenarkan adanya kelalaian dalam hal merespon pembuatan administrasi kependudukan baik keluhan dari masyarakat itu sendiri maupun dari Dukcapil. Namun hal tersebut lalai dilaksanakan karena disebabkan oleh jauhnya jarak antara kantor desa dengan Dukcapil serta jaringan internet yang tidak ada.

**Gambar 1.1**

**Data Yang Belum Rekaman E-KTP**



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN MEMPAWAH HULU
DESA ANSOLOK

DATA YANG BELUM REKAMAN E-KTP

1. NORBERTUS DION
2. PIDUNA GITA
3. OKTAVIANUS KURNIAWAN
4. MARTODIONO GUNAWAN
5. HENUS ERIK MARDIAN
6. GARVAN CAROLUS FEBRIAN
7. KASI MULIA LUMBAN RAJA
8. ADSINA RIRIN
9. MARSYIL FIRMANSYAH
10. GRANCENESIA PUTRI
11. MISDA INDAH AYU PUTRI
12. SAIMAN
13. JULIUS
14. RAYMUNDUS JEPRI
15. SAMANDA
16. LORENSIUS ANGGIO
17. MARSELLUS BAGAS
18. ARIYA SUKARDI
19. DIA
20. ANDI FRANDIKA JOKO
21. LIAELIAS
22. KRISTIAN MORIS
23. ALVONSIUS
24. HERDIANUS PERDI
25. NOVI MELENIUM
26. JANU
27. JANU

***Sumber: Kantor Desa Ansolok, 2025***

Masih terdapat persoalan serius dalam hal pengelolaan administrasi kependudukan. Salah satu contoh diatas adanya 27 orang warga yang hingga kini belum melakukan perekaman e-KTP. Data diatas merupakan perintah dari Dukcapil dari satu tahun yang lalu dan baru di respon tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya tindak lanjut dari pihak pemerintah desa dalam merespon arahan dari Dukcapil terhadap pembuatan KTP. Tanpa e-KTP, warga akan mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik, seperti pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, maupun penerimaan bantuan sosial dari pemerintah. Selain itu, data

kependudukan yang tidak akurat juga menyulitkan pemerintah desa dalam merancang program pembangunan, sebab jumlah penduduk yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kurangnya responsivitas ini menimbulkan kesan bahwa pelayanan administrasi belum menjadi prioritas utama. Padahal, dokumen kependudukan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, hingga akses terhadap bantuan sosial. Ketika aparat desa tidak cepat tanggap terhadap kebutuhan tersebut, warga terpaksa menunggu lebih lama atau bahkan mengulang proses pengurusan dari awal, yang tentu menambah beban waktu, tenaga, dan biaya.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana di Desa Ansolok juga turut memperparah keadaan. Minimnya fasilitas serta dukungan teknologi membuat pelayanan administrasi berjalan lambat. Hal ini seharusnya diimbangi dengan sikap aparat yang lebih proaktif dan komunikatif, namun kenyataannya justru masyarakat kerap merasa kurang diperhatikan. Kondisi tersebut akhirnya menimbulkan rasa kecewa dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Penelitian mengenai efektivitas penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di Desa Ansolok menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penyelenggaraan administrasi kependudukan di Desa Ansolok

telah berjalan secara efektif, faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan dan perbaikan sistem administrasi kependudukan, baik di Desa Ansolok maupun desa-desa lain di Kabupaten Landak.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya tertib administrasi kependudukan sebagai fondasi pelayanan publik, adanya tantangan dalam implementasinya di tingkat desa, serta kebutuhan akan solusi yang konkret dan aplikatif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di Desa Ansolok, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tertib administrasi kependudukan di Desa Ansolok Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak sudah terlaksana tetapi masih belum terselenggara secara optimal untuk memudahkan pelayanan masyarakat dan pekerjaan bidang administrasi. Atas pertimbangan adanya penyelenggaraan penertiban administrasi inilah maka penulis merumuskan judul penelitian ini yaitu “Efektivitas Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kependudukan Di Desa Ansolok Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak”.

## 1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap administrasi kependudukan
2. Pemerintah Desa Ansolok kurang responsif terhadap administrasi kependudukan
3. Sarana dan prasarana yang tidak memadai

## 1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, fokus dalam penelitian ini adalah tanggung jawab pemerintahan desa dalam menjalankan dan melaksanakan tugas administrasi desa dengan baik terutama dalam pengelolaan dan pengaturan surat-surat dan dokumen yang berkaitan dengan operasi pemerintahan desa atau administrasi kependudukan desa pada tahun 2024.

## 1.4. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kependudukan Di Desa Ansolok Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak Tahun 2024?”.

## 1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mendeskrpsikan dan Menganalisis terkait Efektivitas Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kependudukan di Desa Ansolok Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak.

## 1.6. Manfaat Penelitian

### 1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan, yang berkaitan dengan Efektifitas Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kependudukan.

### 1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat menjadi masukan dan menambah pemahaman dan meningkatkan penyelenggaraan tertib administrasi Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagi masyarakat dapat menambah pemahaman masyarakat akan pentingnya keefektifan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan Pemerintahan Desa dapat meningkatkan suatu perkembangan dan pertumbuhan suatu desa.